

PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI DALAM BENTUK GAJI INDUK PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG

Iseu Anggraeni

e-mail : Iseuanggraeni@unibba.ac.id

Rita Nopi Lestari

e-mail : lestari1@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif prosedur, pelaksanaan, serta kendala dalam pembayaran belanja pegawai dalam bentuk gaji induk pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pembayaran gaji merupakan salah satu komponen utama dalam belanja negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja aparatur serta keberlangsungan operasional instansi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik yang berjalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembayaran gaji induk telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengolahan data pada aplikasi Web Gaji dan proses pencairan melalui aplikasi SAKTI hingga penerbitan SP2D oleh KPPN. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulan dan telah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain kesalahan administrasi data, keterlambatan pembaruan data pegawai, gangguan sistem, serta keterbatasan akses aplikasi yang berdampak pada keterlambatan proses pembayaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem teknologi informasi, serta penguatan pengendalian internal untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja pegawai.

Kata kunci: Gaji Induk, Belanja Pegawai, Prosedur Pembayaran, Web Gaji, SAKTI, Keuangan Negara

I. PENDAHULUAN

Pembayaran belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan. Belanja pegawai mencakup berbagai jenis pengeluaran yang berkaitan dengan kompensasi pegawai, di antaranya gaji pokok, tunjangan, dan berbagai fasilitas lainnya yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi pegawai dalam menjalankan tugas negara. Gaji induk sebagai bagian dari belanja pegawai merupakan hak dasar yang harus diterima oleh pegawai secara rutin setiap bulan. Ketepatan dalam pembayaran gaji tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai, tetapi juga berdampak pada motivasi kerja, produktivitas, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan pembayaran gaji harus dilakukan secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam era digitalisasi, proses pembayaran gaji induk telah didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi Web Gaji dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kedua sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang dapat memengaruhi kelancaran proses pembayaran. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembayaran belanja pegawai secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai prosedur pembayaran gaji induk, pelaksanaannya, serta kendala yang dihadapi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN FOKUS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jenis belanja ini termasuk dalam bagian pengelolaan anggaran negara dan wajib dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keuangan negara.

2.1.2 Pengertian Gaji Induk

Menurut Kementerian Keuangan Indonesia Gaji induk adalah gaji rutin yang diterima pegawai, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi dasar pembayaran penghasilan bulanan. Gaji induk mencakup gaji pokok dan tunjangan yang melekat, serta ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian. Pembayaran gaji induk merupakan hak pegawai yang wajib dipenuhi oleh instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan peraturan teknis kepegawaian menjelaskan bahwa gaji induk memiliki fungsi sebagai penghasilan utama pegawai serta menjadi dasar dalam penyesuaian atau perubahan gaji.

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian

Sistem akuntansi penggajian adalah suatu sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk mengelola seluruh transaksi yang berkaitan dengan penggajian karyawan secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini mencakup proses perhitungan upah atau gaji, pelaksanaan pembayaran, serta pelaporan pembayaran termasuk kewajiban perpajakan yang berkaitan. Dengan adanya sistem akuntansi penggajian, organisasi atau instansi dapat memastikan bahwa setiap transaksi penggajian dicatat secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan yang andal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada prosedur, pelaksanaan, dan hasil pembayaran gaji induk. Prosedur yang jelas dan terstandarisasi akan mendukung pelaksanaan yang efektif. Pelaksanaan yang baik akan menghasilkan pembayaran yang tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sistem, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, serta kendala administratif dan teknis.

2.3 Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pembayaran gaji induk yang baik meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran.
2. Pelaksanaan pembayaran yang efektif meningkatkan ketepatan dan akurasi pembayaran gaji pegawai.
3. Kendala administratif dan teknis terhadap efektivitas pembayaran gaji induk.

III. METODE PENELITIAN

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

3.2.1. Populasi dan Sempel

3.2.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh proses pengelolaan pembayaran belanja pegawai pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sempel

Prosedur pembayaran gaji induk Data penggajian pegawai Penggunaan aplikasi Web Gaji dan SAKTI dan Informasi dari pegawai bagian keuangan.

3.2.2 Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan prosedur yang berjalan, mengidentifikasi kendala, serta membandingkan praktik dengan teori dan regulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.2.1 Prosedur Pembayaran Gaji Induk

Proses diawali ketika tahap awal pengelolaan dan pemeriksaan data gaji oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pada tahap ini, data pegawai diperiksa untuk memastikan kesesuaian informasi terkait status kepegawaian, jabatan, tunjangan, dan potongan yang berlaku. Setelah data diperiksa, proses dilanjutkan ke tahapan validasi dan pengujian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertugas memeriksa kesesuaian jumlah gaji dengan ketentuan anggaran serta memastikan seluruh dokumen dan perhitungan sudah benar.

Selanjutnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) melakukan pemeriksaan akhir dan menandatangani dokumen penggajian sebagai bentuk persetujuan sebelum diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN kemudian melakukan verifikasi akhir dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan gaji kepada pegawai. Selain itu, *flowchart* tersebut tidak hanya menunjukkan alur teknis penggajian, tetapi juga memperlihatkan mekanisme pengendalian internal yang diterapkan untuk meminimalkan kesalahan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan menjamin pembayaran gaji dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1 Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Gaji Induk

Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai dalam bentuk gaji induk merupakan kegiatan yang menuntut ketelitian karena berkaitan langsung dengan hak pegawai. Pada tahapan ini, satuan kerja (satker) menerapkan prosedur pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam kegiatan kerja sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan, proses pelaksanaan pembayaran gaji induk dilakukan secara rutin setiap bulan, dimulai dari pengolahan data gaji pegawai, penyusunan dokumen pembayaran, hingga pengajuan pencairan dana ke KPPN sampai gaji diterima oleh pegawai. Pelaksanaan pembayaran gaji induk dilaksanakan dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu Aplikasi Web Gaji dan Aplikasi SAKTI. Kedua aplikasi tersebut saling terhubung dalam proses pembayaran gaji, mulai dari pengolahan data gaji sampai dengan pencairan dana ke rekening pegawai. Menurut ketentuan yang diatur dalam *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020* tentang tata cara pembayaran belanja pegawai gaji dengan menggunakan aplikasi Gaji modul Satker berbasis web, implementasi sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian dan penggajian.

4.2 Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembayaran Gaji Induk

Pelaksanaan pembayaran gaji induk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, karena berhubungan langsung dengan hak pegawai yang harus dipenuhi secara tepat waktu. Proses penggajian ini memanfaatkan dua sistem utama, yakni Web Gaji untuk melakukan verifikasi data pegawai dan aplikasi SAKTI untuk pengajuan pembayaran. Meskipun prosedur penggajian telah diatur secara terstruktur, dalam pelaksanaannya sering muncul kendala yang menghambat kelancaran proses. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersumber dari sistem atau infrastruktur, tetapi juga berasal dari faktor manusia yang terlibat dalam pengelolaan data gaji.

Beberapa permasalahan terjadi cukup sering dan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran, sehingga memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran penggajian menjadi sangat penting. Dengan demikian, kendala dalam pelaksanaan pembayaran gaji induk dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama yang sering muncul, yaitu kurangnya ketelitian pegawai, koneksi internet yang tidak stabil, serta keterbatasan akses pada modul-modul aplikasi SAKTI. Kurangnya ketelitian pegawai.

Beberapa kendala yang sering terjadi diantaranya:

1. Kurangnya ketelitian pegawai dalam memeriksa dan menginput data menjadi salah satu kendala paling signifikan dalam proses pembayaran gaji induk. Ketelitian sangat dibutuhkan karena setiap informasi, sekecil apa pun, berpengaruh pada keakuratan daftar gaji. Kesalahan yang sering terjadi misalnya penulisan kode pegawai yang salah, status pegawai yang tidak diperbarui, atau jabatan yang tercatat tidak sesuai dengan SK terbaru. Ketidaktepatan data ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara sistem Web Gaji dan aplikasi SAKTI, sehingga proses penggajian harus dilakukan ulang. Kondisi ini menyebabkan waktu penyelesaian menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pencairan gaji. Kendala ini termasuk yang paling sering terjadi karena pengelolaan gaji melibatkan banyak data yang harus diperiksa secara akurat, dan setiap tahapannya sangat bergantung pada ketelitian pegawai yang mengelola data tersebut. Selain itu, kurang teliti juga dapat menyebabkan penolakan atau kesalahan dalam validasi sistem, sehingga proses verifikasi harus diulang, menambah beban kerja pegawai, dan mempengaruhi efisiensi penggajian secara keseluruhan.
2. Koneksi internet yang tidak stabil menjadi kendala signifikan karena proses penggajian sepenuhnya dilakukan secara online melalui Web Gaji dan aplikasi

**PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
DALAM BENTUK GAJI INDUK PADA KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN BANDUNG | Iseu Anggraeni,
Rita Nopi Lestari**

SAKTI. Koneksi yang lambat atau sering terputus dapat menghambat penginputan data, pemeriksaan, maupun pengajuan pembayaran. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan proses penggajian, terutama ketika banyak pegawai mengakses sistem secara bersamaan pada periode pembayaran gaji yang padat. Selain memperlambat pengajuan data, gangguan koneksi internet juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan input karena pegawai harus melakukan pengulangan proses beberapa kali untuk memastikan data berhasil tersimpan. Kondisi ini memerlukan waktu tambahan dan menurunkan efisiensi kerja, sehingga sistem yang seharusnya mempercepat penggajian justru menjadi salah satu sumber keterlambatan.

3. Beberapa modul dalam aplikasi SAKTI hanya dapat diakses oleh satu pengguna pada satu waktu. Keterbatasan ini menimbulkan hambatan ketika beberapa pegawai perlu melakukan input atau validasi data secara bersamaan, sehingga terjadi antrean yang memperlambat proses penggajian. Kendala ini tidak hanya menunda tahapan pengajuan pembayaran, tetapi juga memengaruhi koordinasi antarpegawai, karena mereka harus bergantian menggunakan modul tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam praktiknya, keterbatasan akses sering menjadi penyebab utama keterlambatan, terutama pada periode penggajian yang padat. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya cepat selesai menjadi tertunda, dan risiko kesalahan input meningkat karena pegawai mungkin terburu-buru saat giliran mengakses sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penggajian tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada prosedur penggunaan sistem yang memiliki keterbatasan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembayaran gaji induk di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah dirancang dan dilaksanakan secara terstruktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Tahapan proses diawali dengan pengelolaan serta pembaruan data gaji pegawai melalui aplikasi Web Gaji, kemudian dilakukan pemeriksaan, validasi, dan verifikasi data oleh pejabat yang berwenang. Setelah data dinyatakan lengkap dan benar, proses dilanjutkan dengan penyusunan serta pengajuan dokumen pembayaran melalui aplikasi SAKTI hingga pencairan dana oleh KPPN. Mekanisme yang jelas dan berlapis tersebut menunjukkan adanya penerapan pengendalian internal yang memadai untuk menjamin ketepatan perhitungan, ketertiban administrasi, dan akuntabilitas pembayaran gaji induk.
2. Pembayaran gaji induk dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaannya memanfaatkan aplikasi Web Gaji yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI sebagai sarana pengajuan dan pencairan dana secara elektronik. Pemanfaatan sistem tersebut membantu mempermudah pengolahan data, mengurangi potensi kesalahan perhitungan, serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pembayaran. Keterlibatan PPABP, Bendahara Pengeluaran, PPK, PPSPM, dan KPPN pada setiap tahapan proses mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pelaksanaan pembayaran gaji induk berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara.
3. Dalam pelaksanaannya pembayaran gaji induk masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut meliputi kurangnya ketelitian sebagian pegawai dalam penginputan dan pemeriksaan data gaji, keterbatasan stabilitas jaringan internet, serta pembatasan akses pada beberapa modul aplikasi SAKTI bagi pegawai tertentu. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran proses penggajian dan memengaruhi efektivitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi dan ketelitian sumber daya manusia, disertai dengan perbaikan sistem

serta infrastruktur teknologi informasi guna mendukung kelancaran pembayaran gaji induk di masa mendatang.

4.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketelitian dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan data gaji melalui pengecekan menyeluruh terhadap komponen data serta didukung dengan pembinaan dan pelatihan berkala terkait penggunaan aplikasi Web Gaji dan SAKTI guna meminimalkan kesalahan administrasi.
2. Memperkuat koordinasi dan pengaturan alur kerja antar pegawai dalam setiap tahapan proses penggajian, mulai dari penginputan hingga pengajuan pembayaran, melalui pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang efektif agar proses pembayaran gaji induk berjalan lancar dan tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas dan stabilitas jaringan internet serta dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang penggunaan aplikasi Web Gaji dan SAKTI, sehingga proses pengolahan dan pencairan gaji induk dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Alwi, dkk., (2003) *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 912 [diakses pada hari kamis 04 Desember 2025, jam 12:25 wib].
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan*. Salemba Empat. hlm.45 [diakses pada hari kamis 04 Desember 2025, jam 12:43 wib].
- Soemarso S.R. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. hlm.309 [diakses pada hari kamis 04 Desember 2025, jam 13:16 wib].
- Perbendaharaan, D. J. (2020). *Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER -24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji*. <<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-24-pb-2020>> [diakses pada hari sabtu 13 Desember 2025, jam 21:46 wib].
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Gaji, Kemenkeu RI*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-24-pb-2020> [diakses pada hari sabtu 13 Desember 2025, jam 21:46 wib].
- Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 'Tentang Tugas Dan Fungsi' <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/magelang/id/profil/tugas-dan-fungsi>> [diakses pada hari jum'at 12 Desember 2025, jam 21:17 wib].
- Ditjen Perbendaharaan Kementrian keuangan, R. indonesia. (2025). *Juknis Aplikasi Sakti*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/purworejo/id/layanan/layanan-umum/sakti-juknis> [diakses pada hari jum'at 12 Desember 2025, jam 20:50 wib].